PEGAWAI MILENIAL BEA CUKAI KUALANAMU UNGGAH PELANGGARAN PEJABAT, OMBUDSMAN SARANKAN INI

Senin, 27 Maret 2023 - Edward Silaban

KILAT.COM - Dunia maya dihebohkan dengan unggahan sebuah surat terbuka yang mengatasnamakan pegawai milenial Bea Cukai Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut). Unggahan tersebut menjadi perbincangan di masyarakat. Surat tersebut membongkar sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di Bea Cukai secara nasional selama periode Januari-Desember 2022 silam.Dalam unggahan yang dibagikan oleh akun media sosial Twitter @PartaiSocmed disebutkan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Bea Cukai secara nasional mulai dari Pejabat Fungsional PBC Ahli Pratama, Eselon IV, hingga Eselon III.

Salah satu hal yang diungkapkan adalah persoalan registrasi IMEI. Hal ini akhirnya disoroti ombudsman RI Perwakilan Sumut. Kepala ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyarankan para pegawai milenial Bea Cukai K

"Tidak perlu khawatir, identitas mereka yang melapor, dijamin dirahasiakan. Jadi, biar masalah ini lebih terbuka, kami menunggu para pegawai milenial itu melapor," katanya. Abyadi meminta para pegawai milenial tersebut segera membuat laporan ke Kantor ombudsman Sumut di Jalan Sei Besitang, Kota Medan.

"Silahkan saja datang ke Kantor ombudsman Sumut, Jalan Sei Besitang Medan," ucapnya.

Terpisah, Kepala Kantor Bea Cukai (BC) Kualanamu Elfi Haris, turut angkat bicara atas unggahan yang viral di media sosial tersebut.Elfi mencurigai ada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan pegawai milenial Bea Cukai

Elfi mengatakan pihaknya telah melakukan tindakan terhadap kelemahan yang terjadi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proses registrasi IMEI."Hasil monev layanan registrasi IMEI di September-Oktober 2022 memotret kondisi layanan registrasi IMEI selama setahun. Seluruhnya terlihat dari monev, baik itu kelemahan yang perlu diperbaiki maupun anomali putusan pegawai. Semua sudah ditindaklanjuti. Pegawai yang lalai juga sudah diperiksa dan dijatuhi hukuman sesuai PP 94 tahun 2021," katanya. (*)